



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2020

Penyusun:

Penanggung Jawab: Alfiker Siringoringo | Ketua Tim: Andi Permadi |
Anggota: Wahyu Budiarmo | Henjang P. | Zuhdi Eka N. |
Yumi Gantika | Tyas Ayu Prasanti | Suryati

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Babel**

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya, Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I-2020 Provinsi Bangka Belitung dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

KFR sebagai salah satu output pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb disusun untuk memotret dan menganalisis perkembangan ekonomi dan fiskal serta pengaruhnya terhadap pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.

KFR ini merupakan wujud terjalinnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik di lingkup Provinsi Bangka Belitung dalam memberikan data dan bahan analisis sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi dan fiskal di Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak tersebut, semoga sinergi yang telah terjalin dapat tetap berlanjut.

Kami sadari KFR ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi perbaikan kajian selanjutnya. Harapan kami semoga kajian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam proses penyusunan kebijakan fiskal, baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga dapat memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.



Pangkalpinang, Mei 2020
Kepala Kantor Wilayah,

Alfiker Siringingo

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional 1	
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	2
C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2
D. Tingkat Kemiskinan	3
II. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN 4	
A. Pendapatan Negara	5
B. Belanja Negara.....	7
C. Prognosis Realisasi APBN Sampai Dengan Akhir 2020.....	11
III. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD 11	
A. Pendapatan Daerah	12
B. Belanja Daerah.....	14
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir 2020.....	15
IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 16	
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	16
B. Pendapatan Konsolidasian	17
C. Belanja Konsolidasian	18
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	19
V. Berita Fiskal Terpilih: Tekanan COVID-19 terhadap Perekonomian Babel 20	
A. Dampak Terhadap Perekonomian dan Fiskal Pemerintah Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	21
B. Alokasi APBN.....	24
C. Alokasi APBD.....	25

Daftar Pustaka

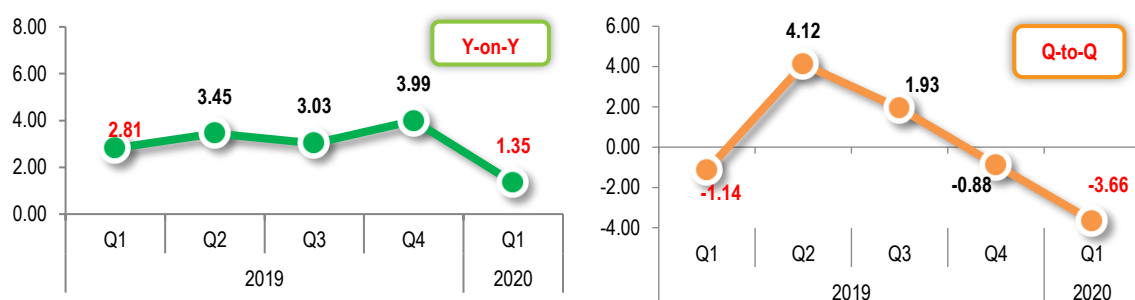
Lampiran

I. Perkembangan Ekonomi Regional

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Babel triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp18.631 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13.161 miliar. Ekonomi Kep. Babel triwulan I-2020 tumbuh 1,35 persen, mengalami perlambatan bila dibandingkan triwulan I-2019 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 2,81 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan IV-2019 (q-to-q), ekonomi Kep. Babel triwulan I-2020 berkontraksi sebesar 3,66 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan I-2020 sebesar minus 1,85 persen (q-to-q), tetapi secara y-on-y tumbuh sebesar 3,25 persen. Sementara PDRB Kep. Babel memberikan kontribusi sebesar 2,15 persen terhadap PDRB Sumatera dan 0,46 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Triwulanan Ekonomi Babel (YoY) dan (Q-to-Q) (%)



Sumber : BPS Prov. Babel (diolah)

Dari sisi produksi, penyumbang perlambatan triwulan I-2020 (YoY) adalah dua lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) yakni lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan serta Industri Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, perlambatan kinerja perekonomian dipengaruhi oleh komponen PMTB dan Ekspor Luar Negeri yang berkontraksi.

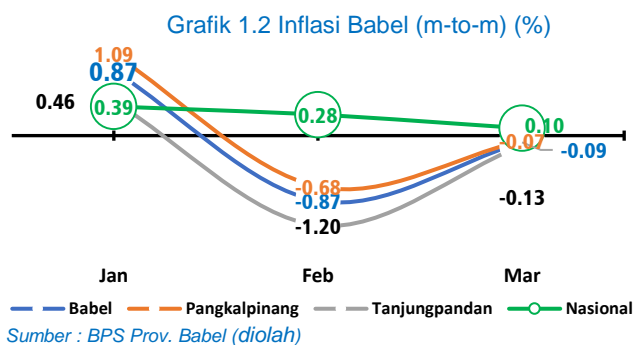
Pertumbuhan ekonomi Kep. Babel triwulan I-2020 (q-to-q) berkontraksi sebesar 3,66 persen. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,82 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh sebesar 3,41 persen; Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 4,05 persen; Real Estat yang tumbuh sebesar 1,01 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 3,24 persen.

Musim panen raya komoditas tanaman pangan dan hortikultura di triwulan I-2020 mampu mendorong pertumbuhan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu, meskipun pandemi COVID-19 baru mulai ada di Indonesia

pada bulan Maret 2020, namun dampaknya sudah mulai dirasakan oleh berbagai lapangan usaha. Ada yang terdampak positif seperti pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan, juga yang terdampak negatif seperti pada lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan serta Jasa Lainnya.

B. Inflasi

Inflasi bulanan (m-to-m) periode triwulan I-2020 di Babel pada level fluktuatif, dengan deflasi sebesar 0,87 pada bulan Februari 2020. Inflasi bulanan pada akhir triwulan I-2020 mencapai -0,09 dimana secara nasional tingkat inflasi sebesar 0,10. Deflasi disumbang dari kelompok bahan makanan ini disebabkan oleh penurunan harga terutama dari sub kelompok ikan segar, daging ayam ras, cabai dan sayuran. Menurunnya inflasi bulan Februari ini seiring dengan normalisasi permintaan pasca peak season di bulan Desember dan Januari.



Pada bulan Maret masih mengalami deflasi sebesar 0,09. Laju tekanan inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,34 persen (m-to-m) dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,58 persen (m-to-m). Sedangkan

harga komoditas kelompok pengeluaran lain cukup stabil. Secara umum deflasi bulan Maret dipicu oleh kelompok transportasi dengan andil sebesar -0,24 persen. Khususnya transportasi angkutan udara dengan andil sebesar -0,245 persen hal ini seiring dengan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

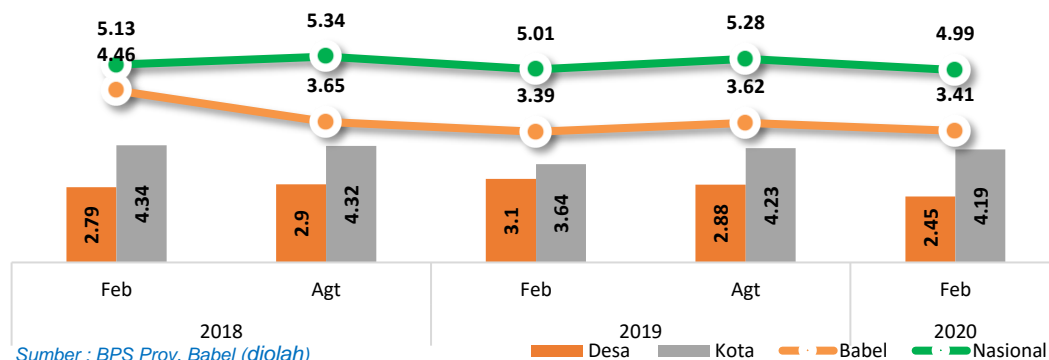
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 sebesar 3,41 persen, naik 0,02 poin persen dibanding TPT pada Februari 2019 dan turun sebesar 0,21 poin persen dibandingkan kondisi Agustus 2019, yaitu sebesar 3,62 persen. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2020 sebesar 69,93 persen, naik sebesar 2,04 poin persen dibanding TPAK Februari 2019 (67,89 persen).

Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada lapangan usaha pertanian yaitu sebesar 26,89 persen. Lapangan usaha terbesar kedua penyerap tenaga kerja adalah usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan untuk mobil dan sepeda

motor yaitu sebesar 18,00 persen. Sedangkan yang ketiga adalah lapangan usaha pertambangan dan pengalihan (15,57).

Jika dibandingkan dengan Februari 2019 penyerapan tenaga kerja lapangan usaha pertanian dan perdagangan mengalami penurunan (28,14 persen dan pertambangan 17,86 persen) sedangkan perdagangan menalami kenaikan (16,98 persen). Kedua sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut terkait dengan masih rendahnya harga dan permintaan pada komoditas andalan Babel (sawit, lada, karet dan timah).

Grafik 1.3 Inflasi Babel (m-to-m) (%)



TPT tertinggi pada kelompok pendidikan Diploma/Universitas yaitu sebesar 6,98 persen. Sedangkan tingkat pengangguran pada jenjang SMA/SMK sebesar 5,23 persen dan SMP kebawah sebesar 1,87 persen. TPT di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang salah satu faktornya adalah lapangan usaha di kota merupakan lapangan usaha formal yang mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan tertentu. Sedangkan lapangan usaha di perdesaan lebih banyak merupakan lapangan usaha informal yang hampir semua angkatan kerja bisa melakukan pekerjaan yang tersedia.

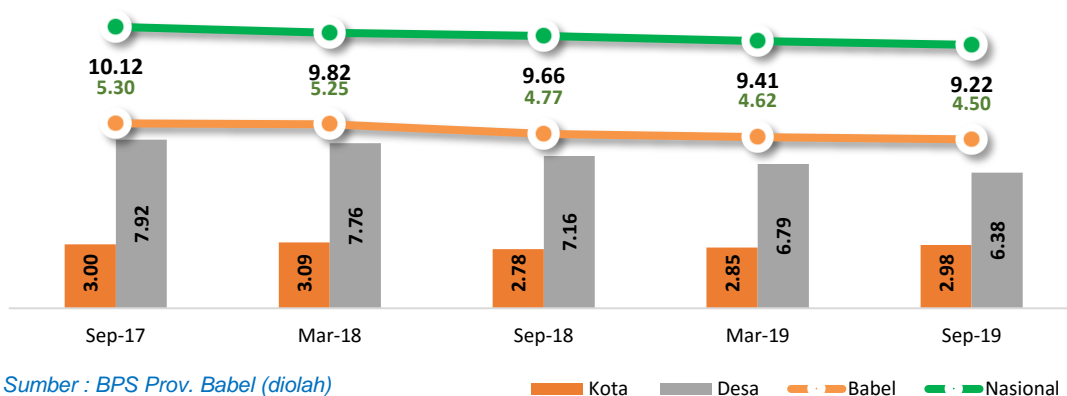
D. Tingkat Kemiskinan

Pada September 2019, persentase penduduk miskin mencapai 4,50 persen, turun sebesar 0,27 poin persen dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 4,77 persen. Tren pergerakan tingkat kemiskinan sejak 2015 sampai dengan 2019 berfluktuasi, mulai september 2015 menunjukkan kenaikan, dimana kenaikan tertinggi pada Maret 2018 namun setelah itu mengalami tren menurun hingga September 2019.

Tingkat kemiskinan September 2019 tersebut jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada di angka 9,22 persen. Meskipun demikian, garis kemiskinan di Babel adalah yang tertinggi di Indonesia. Pada September 2019, garis kemiskinan nasional sebesar Rp440.538 per kapita per bulan dan garis kemiskinan Kep. Babel sebesar Rp714.846 per kapita per bulan.

Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2018 sebesar 2,78 persen naik menjadi 2,98 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2018 sebesar 7,16 persen mengalami penurunan menjadi 6,38 persen pada September 2019.

Grafik 1.4 Tingkat Kemiskinan Babel (m-to-m) (%)



Sumber : BPS Prov. Babel (diolah)

Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan didorong oleh kecenderungan Garis Kemiskinan (tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi) di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2019, garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp705.147 per kapita per bulan sedangkan di perdesaan sebesar Rp725.743 per kapita per bulan. Sepanjang 2019, garis kemiskinan Babel mengalami kenaikan sebesar 7,64 persen, yaitu dari Rp664.120 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp714.846 per kapita per bulan pada September 2019.

Tingkat kemiskinan di perdesaan berpengaruh terhadap upaya mendongkrak IPM dari aspek pendidikan dengan cara menekan sekecil mungkin angka putus sekolah. Sementara itu putus sekolah erat kaitannya dengan kemiskinan orangtua. Mendorong anak untuk terus sekolah melalui kampanye pentingnya pendidikan tidaklah cukup karena harus diikuti upaya perbaikan kesejahteraan bagi keluarga si anak. Sehingga Program Indonesia Pintar (PIP) harus berjalan bersamaan dengan program jaminan sosial lainnya (PKH) yang cakupannya perlu diperluas tidak hanya kepada rumah tangga miskin, tapi juga rumah tangga yang hampir miskin, yang berpotensi jatuh ke kategori miskin jika terjadi fluktuasi harga dan inflasi pada komoditas pokok.

II. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN

Realisasi pendapatan APBN di Babel sampai dengan triwulan I-2020 sebesar Rp734,47 miliar, atau turun 7,75 persen dibandingkan triwulan I-2019, yang didorong oleh penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 8,22 persen. Sedangkan realisasi

belanja sebesar Rp2.146,80 miliar atau turun 1,14 persen dibandingkan triwulan I-2019. Penurunan ini seiring dengan penurunan pagu sebesar 2,09 persen. Defisit APBN tahun berjalan sebesar Rp1.412,33 miliar, atau naik 2,68 persen dibandingkan triwulan I-2019.

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan I-2020 (miliar Rupiah)

Uraian	2019			2020			Pertumbuhan (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	
A. PENDAPATAN NEGARA	2.693,39	796,19	29,56	2.392,73	734,47	30,70	(7,75)
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.693,39	796,19	29,56	2.392,73	734,47	30,70	(7,75)
1. Penerimaan Pajak	2.580,75	754,58	29,24	2.279,51	692,55	30,38	(8,22)
2. PNBP	112,64	41,61	36,94	113,23	41,92	37,02	0,74
II. HIBAH	-	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	10.164,32	2.171,59	21,36	9.952,16	2.146,80	21,57	(1,14)
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.683,86	363,50	13,54	2.744,25	373,99	13,63	2,89
1. Belanja Pegawai	1.018,43	186,43	18,31	984,68	203,44	20,66	9,12
2. Belanja Barang	1.272,46	159,01	12,50	1.200,03	147,13	12,26	(7,47)
3. Belanja Modal	386,26	17,33	4,49	554,63	21,33	3,85	23,11
4. Belanja Bantuan Sosial	6,72	0,72	10,73	4,90	2,09	42,68	189,83
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	7.480,45	1.808,10	24,17	7.207,92	1.772,81	24,60	(1,95)
1. Transfer ke Daerah	7.170,62	1.756,02	24,49	6.886,18	1.643,09	23,86	(6,43)
a. Dana Perimbangan	7.064,88	1.703,15	24,11	6.725,45	1.643,09	24,43	(3,53)
1) Dana Alokasi Umum	4.473,12	1.480,35	33,09	4.535,68	1.401,90	30,91	(5,30)
2) Dana Bagi Hasil	1.120,48	146,89	13,11	554,36	81,82	14,76	(44,30)
3) Dana Alokasi Khusus	1.471,29	75,91	5,16	1.635,41	159,37	9,75	109,95
b. Dana Transfer Lainnya(DID)	105,74	52,87	50,00	160,73	-	-	(100,00)
2. Dana Desa	309,83	52,08	16,81	321,74	129,72	40,32	149,08
C. SURPLUS DEFISIT	(7.470,92)	(1.375,40)	18,41	(7.559,43)	(1.412,33)	18,68	2,68

Sumber : OMSPAN, MEBE, SIMTRADA, KPP dan KPP BC lingkup Babel (diolah)

A. Pendapatan Negara

Pendapatan negara di Babel bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar (94,29 persen) dari total pendapatan atau turun 5,71 persen dibandingkan triwulan I-2019.

Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Negara s.d. Triwulan I-2020

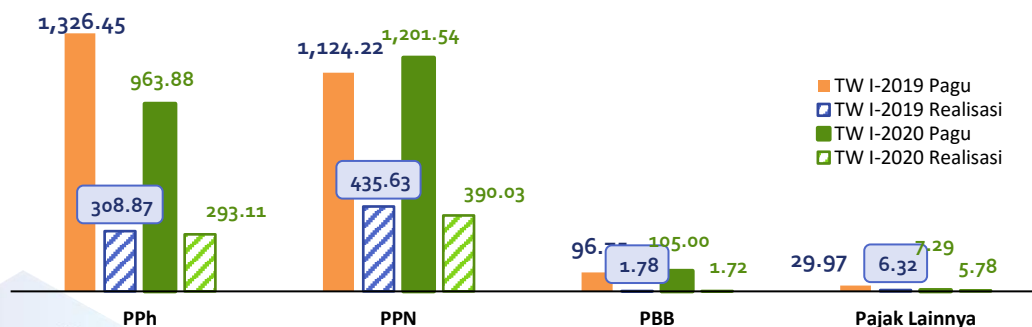


Sumber : OMSPAN (diolah)

1. Penerimaan Perpajakan

Penyumbang utama penerimaan pajak bersumber dari penerimaan PPh dan PPN. Realisasi perpajakan ini turun 8,22 persen dibandingkan triwulan I-2019. Penurunan ini bersumber dari menurunnya realisasi PPN (10,47 persen) serta PPh (5,10 persen).

Grafik 2.2 Realisasi Pajak Dalam Negeri s.d. Triwulan I-2020 (miliar Rupiah)



Sumber : OM SPAN dan KPP Pratama Lingkup Babel (diolah)

a) Pajak Penghasilan (PPH)

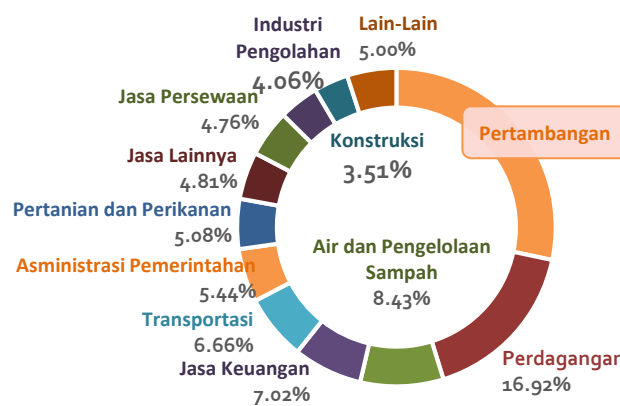
Realisasi PPh mencapai Rp293,11 miliar (30,41 persen dari target), atau turun 5,10 persen dari triwulan I-2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas pertambangan timah sebagai dampak penurunan harga timah global akibat dari pandemi COVID-19 Tiongkok sejak Desember 2019, sehingga setoran PPh 23 atas Jasa Pertambangan Timah juga mengalami penurunan.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Realisasi PPN mencapai Rp390,03 miliar atau 32,46 persen dari target, turun 10,47 persen dibandingkan triwulan I-2019. Penurunan penerimaan PPN ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan permintaan dan produksi komoditas menurun termasuk timah.

Sementara itu jika dilihat komposisinya, sektor usaha pertambangan khususnya timah memang menjadi penyumbang penerimaan PPN terbesar di Babel yaitu sebesar 28,31 persen.

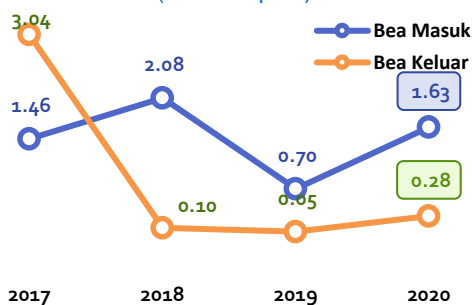
Grafik 2.3 Realisasi PPN per Sektor s.d. Triwulan I-2020



Sumber : KPP Pratama lingkup Babel (diolah)

c) Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar

Grafik 2.4 Tren Realisasi Pajak Perdagangan Internasional s.d. Triwulan I-2020 (miliar Rupiah)



Sumber : OM SPAN (diolah)

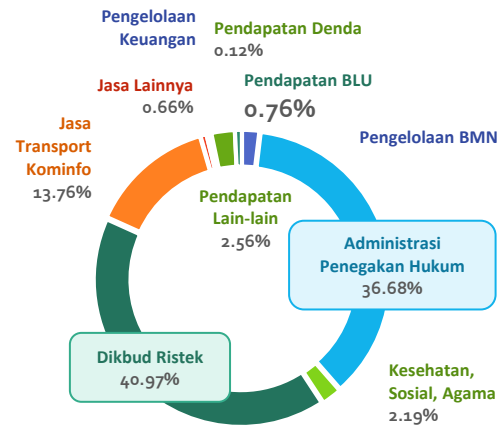
Realisasi bea masuk sebesar Rp1,63 miliar (117,30 persen dari target) atau mengalami peningkatan sebesar 134,04 persen dibandingkan triwulan I-2019. Naiknya penerimaan bea masuk ini bersumber dari peningkatan kegiatan sektor impor untuk komoditi *anthracite* dan *sparepart* mesin. Realisasi bea keluar mencapai Rp0,28 miliar (70,13 persen dari target) meningkat signifikan (5 kali lipat) dari realisasi triwulan I-2019. Kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Februari 2020 yang berada di atas USD 750 per ton (dasar pengenaan bea keluar) menjadi penyebab utama peningkatan volume ekspor CPO di Babel triwulan ini.

d) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sampai triwulan I-2020, realisasi PNBP meningkat 0,74 persen dibandingkan triwulan I-2019. Komposisi PNBP sebagian besar bersumber dari pendapatan

pendidikan budaya, riset dan teknologi sebesar 40,97 persen dan pendapatan administrasi penegakan hukum sebesar 36,68 persen. Realisasi pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebagian besar berasal dari pendapatan pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang mencapai 61,55 persen. Sedangkan realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi sebesar 98,91 persen berasal dari pendapatan biaya pendidikan.

Grafik 2.5 Proporsi PNBPN s.d. Triwulan I-2020



Sumber : OM SPAN (diolah)

2. Hibah

Realisasi hibah hingga triwulan I-2020

senilai Rp42,94 miliar terdiri dari hibah barang senilai Rp41,03 miliar dan hibah uang senilai Rp1,91 miliar, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,09 miliar.

Tabel 2.2 Daftar Penerbitan Register Hibah Langsung s.d. Triwulan I-2020 (miliar Rupiah)

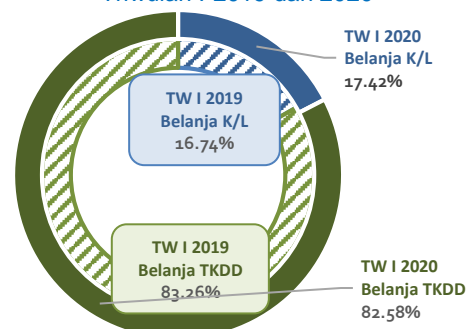
Jenis Hibah	Pemberi Hibah	Satker Penerima Hibah	Nilai (miliar)
Barang	Individu	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pangkalpinang	0,05
	Pemkot Pangkalpinang	KPU Kota Pangkalpinang	0,38
	Pemkab Belitung	Kejaksaan Negeri Belitung	1,49
Uang	Pemprov Kep. Bangka Belitung	Bandara H.A.S. Hanandjoeddin	0,50
		Kanwil Kemenag	4,57
		Rosarpras Polda Babel	12,50
	Pemkot Pangkalpinang	Polres Pangkalpinang	10,00
	Pemkab Bangka Barat	Polres Bangka Barat	2,56
	Pemkab Bangka Tengah	KOREM-045/GAYA DAM II/SWJ	1,00
		Polres Bangka Tengah	3,00
	Pemkab Bangka Selatan	KOREM-045/GAYA DAM II/SWJ	0,30
		Polres Bangka Selatan	2,41
	Pemkab Belitung	Rosarpras Polda Babel	1,00
		Polres Belitung	0,33
	Pemkab Belitung Timur	Polres Belitung Timur	2,85
	TOTAL		

Sumber : OMSPAN (diolah)

B. Belanja Negara

Belanja negara terbagi atas dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja pemerintah pusat memiliki komposisi sebesar 17,42 persen, belanja TKDD sebesar 82,58 persen.

Grafik 2.6 Proporsi Belanja Negara Triwulan I-2019 dan 2020



Sumber : OM SPAN, MEBE, SIMTRADA (diolah)

1. Belanja Pemerintah Pusat

a. Klasifikasi per Jenis Belanja

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai triwulan I-2020 meningkat 2,89 persen dibandingkan triwulan I-2019, mencapai 13,63 persen dari pagu yang ditetapkan.

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Belanja s.d. Triwulan I-2020 (miliar Rupiah)

Jenis Belanja	2019			2020			Pertumbuhan (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	
Belanja Pegawai	1.018,43	186,37	18,30	984,68	203,44	20,66	9,16
Belanja Barang	1.272,46	159,06	12,50	1.202,47	147,13	12,24	(7,50)
Belanja Modal	386,26	17,33	4,49	551,40	21,33	3,87	23,11
Belanja Bansos	6,72	0,72	10,73	4,90	2,09	42,68	189,83
Total	2.683,86	363,47	13,54	2.743,45	373,99	13,63	2,89

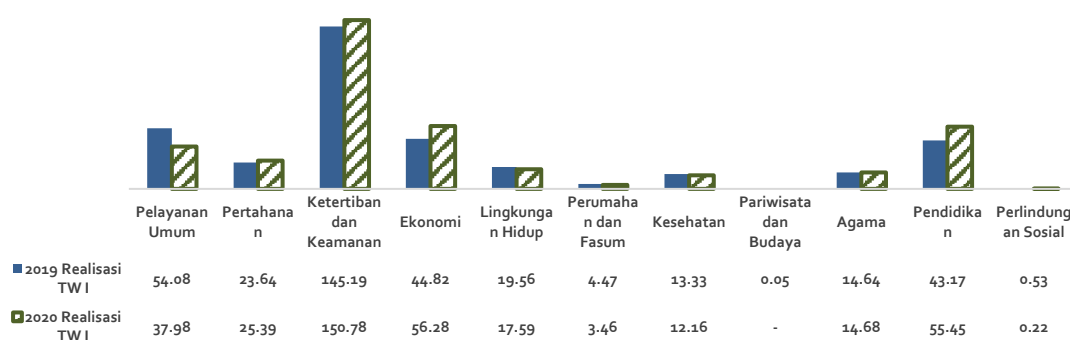
Sumber : MEBE dan OM SPAN (diolah)

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pegawai, modal, dan bantuan sosial. Sebaliknya, realisasi belanja barang mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh sejumlah persiapan realokasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19.

b. Klasifikasi berdasarkan Fungsi

Terdapat sebelas fungsi belanja Pemerintah Pusat, alokasi terbesar terdapat pada fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar 28,97 persen atau Rp794,82 miliar. Sementara fungsi-fungsi terkait dengan pengembangan sektor unggulan seperti Pariwisata hanya mendapat alokasi 0,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor unggulan Babel masih belum optimal. Secara umum, hampir realisasi seluruh fungsi mengalami penurunan kecuali fungsi pertahanan, ketertiban keamanan, ekonomi dan pendidikan.

Grafik 2.7 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi Belanja Triwulan I-2019 dan 2020 (miliar Rupiah)



Sumber : MEBE dan OM SPAN (diolah)

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dibandingkan tahun sebelumnya, pagu TKDD tahun 2020 turun dari Rp7,48 triliun menjadi Rp7,21 triliun. Meskipun realisasi turun dari Rp1,81 triliun menjadi Rp1,77 triliun,

namun secara persentase naik dari 24,17 persen menjadi 24,60 persen Sampai dengan triwulan I-2020 DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) belum terdapat realisasi.

Terhitung mulai tahun 2020, implementasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 dan PMK Nomor 205 PMK.07/2019. Dana BOS juga disalurkan langsung ke rekening sekolah melalui KPPN provinsi sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020. Penyaluran Dana BOS di Babel dilakukan oleh KPPN Pangkalpinang.

Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp129,72 miliar atau 40,32 persen dari pagu senilai Rp321,74 miliar. Terdapat dua skema penyaluran dana Desa, yaitu skema normal/reguler sebanyak 3 tahap dan skema kinerja terbaik/desa mandiri sebanyak 2 tahap. Saat ini terdapat 2 Kabupaten di Babel yang skema penyalurannya 2 tahap, yaitu Kab. Babar dan Kab. Basel.

Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Triwulan I-2019 dan 2020 (miliar Rupiah)

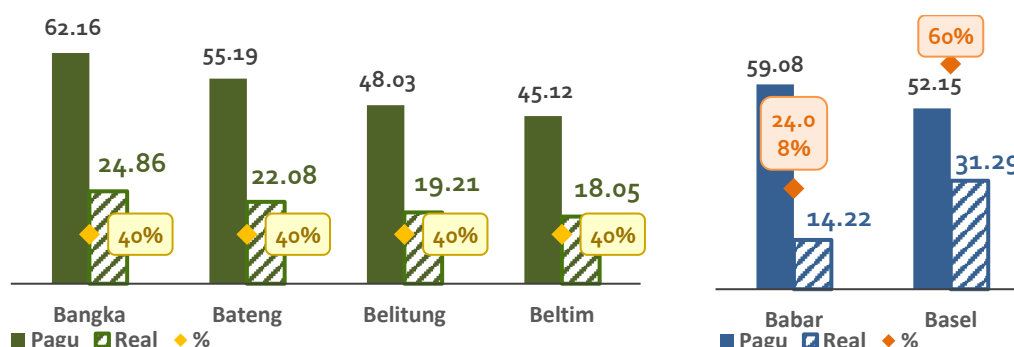
Uraian	2019			2020			Pertumbuhan (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi TW I (%)	
DBH	1.120,48	146,89	13,11	554,36	81,82	14,76	(44,30)
DAU	4.473,12	1.480,35	33,09	4.535,68	1.401,90	30,91	(5,30)
DAK Fisik	701,00	-	-	858,37	-	-	-
DID	105,74	52,87	50,00	160,73	-	-	(100,00)
DAK Nonfisik	770,28	75,91	9,85	777,04	159,37	20,51	109,95
Dana Desa	309,83	52,08	16,81	321,74	129,72	40,32	149,08
TOTAL	7.480,45	1.808,10	24,17	7.207,92	1.772,81	24,60	(1,95)

Sumber : SIMTRADA dan OM SPAN (diolah)

Meskipun terbilang lancar, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penyaluran dana desa 2020 antara lain:

- Kurangnya tingkat akurasi Rekening Kas Desa sehingga berpotensi terjadi retur.
- Lambannya penetapan dan penyampaian Perdes tentang APBDes.

Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi Penyaluran TWI Dana Desa s.d.Triwulan I- 2020 (miliar Rupiah)



Sumber : SIMTRADA dan OM SPAN (diolah)

Sedangkan realisasi penyaluran Dana BOS mencapai Rp88,54 miliar atau 27,94 persen dari pagu senilai Rp317 miliar yang diperuntukkan bagi 1.158 sekolah di Babel. Secara

umum tidak terdapat permasalahan berarti dalam penyaluran Dana BOS oleh KPPN Pangkalpinang.

Suksesan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN Pangkalpinang Gelar Rakor

POSBELITUNG.CO, BANGKA--Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2020 untuk menyukseskan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I 2020. Kakanwil DJPb Provinsi Babel Alfiker Siringoringo pada sambutannya mengatakan, bahwa penganggaran seharusnya mengikuti prinsip money follow program, yaitu anggaran mengikuti program yang ditetapkan pemerintah. Dia mengatakan, terdapat perubahan dalam kebijakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2020 antara lain tahapan dalam penyaluran yang semakin sedikit, waktu penyaluran yang lebih cepat, besaran penyaluran tiap tahap yang meningkat serta penyaluran Dana Desa yang dilakukan langsung ke rekening Desa, meskipun Dana yang disalurkan langsung tetap dicatat di RKUD.

"Perubahan kebijakan ini pada intinya bertujuan untuk mempercepat sampainya dana APBN ke pihak yang dituju, sehingga manfaat APBN bisa dirasakan lebih cepat di tahun berkenaan," ujarnya

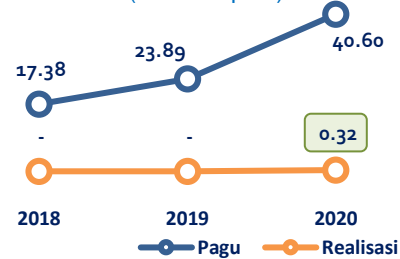
<https://belitung.tribunnews.com>, 4 Maret 2020

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Bandara H.A.S. Hanandjoeddin mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK-BLU) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 586/KMK.05/2017 dengan jenis layanan Transportasi. Pendapatan BLU hanya mencapai 0,78 persen karena status satker

BLU Bandara H. AS Hanandjoeddin dicabut per 5 Maret 2020. Pengelolaan bandara berubah menjadi Kerja sama Pemanfaatan (KSP) dengan PT Angkasa Pura II (Persero).

Grafik 2.8 Tren Realisas Pendapatan BLU (miliar Rupiah)



Sumber : OM SPAN (diolah)

4. Manajemen Investasi Pusat

Terdapat dua skema kredit program yang dilaksanakan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai semester I-2020, penyaluran KUR mencapai Rp227,95 miliar dengan jumlah debitur 5.817 orang. Jumlah tersebut meningkat 23,79 persen dibandingkan semester I-2019 yang senilai Rp184,15 miliar dengan jumlah debitur 5.679 orang. Hal ini menunjukkan bahwa KUR semakin dikenal oleh UMKM sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

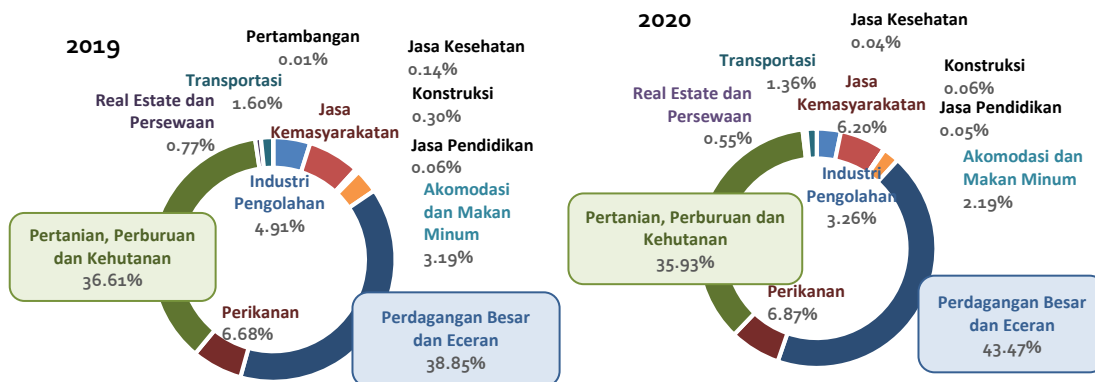
Sektor perdagangan dan pertanian masih mendominasi sebaran penyaluran dengan nilai masing-masing sebesar Rp88,58 miliar dan Rp83,47 miliar. Penyaluran untuk kedua sektor tersebut hampir 75,47 persen dari total penyaluran KUR di Babel.

Tingkat partisipasi Pemda Provinsi dalam mendukung SIKP meningkat cukup signifikan sepanjang triwulan I 2020. Pemda secara aktif menjalin sinergi dengan perbankan, OPD pembina UKM, dan Kanwil DJPb Prov. Babel.

Pada triwulan I 2020, realisasi penyaluran UMi di Babel mencapai Rp293,7 juta dengan debitur sejumlah 41 orang. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan

realisasi penyaluran secara nasional yang mencapai Rp1,06 triliun dengan debitur sejumlah 323.211 orang.

Grafik 2.9 Proporsi Penyaluran KUR per Sektor Triwulan I-2019 dan 2020 (miliar Rupiah)



Sumber : SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN Sampai Dengan Akhir 2020

Prognosis realisasi APBN 2020 untuk komponen pendapatan diperkirakan mengalami penurunan akibat pelemahan kegiatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta penurunan produksi komoditas ekspor sebagai dampak COVID-19. Selain itu adanya kebijakan relaksasi perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 23 tahun 2020, yang diantara meliputi Pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 serta pengembalian pendahuluan kelebihan PPN menyebabkan turunnya setoran pajak 2020.

Sementara itu, belanja negara diperkirakan ikut melemah khususnya belanja modal dan belanja barang. Belanja pegawai akan tetap terealisasi sama dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat belanja pegawai yang sifatnya rutin dibayarkan. Belanja bansos diperkirakan akan tumbuh signifikan di tahun 2020 sebagai salah satu langkah penanganan dan pencegahan pandemic COVID-19.

TKDD juga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan munculnya kebijakan baru terkait penyesuaian pagu TKDD melalui PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Realisasi DAK Fisik mengalami perlambatan kecuali untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan selain alokasi sub bidang pembangunan GOR dan sub bidang Perpustakaan Daerah. Selain itu dilakukan *refocusing* Dana Desa untuk penanganan COVID-19, penyaluran juga dipercepat dengan penghapusan syarat Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output untuk penyaluran Tahap II. Percepatan penyaluran Tahap III menjadi paling cepat bulan Juni diprediksi akan mendongkrak tingkat realisasi Dana Desa 2020.

III. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

Pada triwulan I-2020, realisasi pendapatan daerah konsolidasian lingkup Babel mencapai Rp 1.895,88 miliar (21,68 persen dari target) atau naik 4,33 persen dari triwulan I-2019. Sedangkan realisasi belanja daerah konsolidasian mencapai Rp[

1.157,95 miliar (12 persen dari pagu) atau turun 6,61 persen dari triwulan I-2019. Dengan realisasi pendapatan lebih tinggi daripada belanja, APBD berjalan masih tetap terjaga pada posisi surplus.

Realisasi APBD Konsolidasian s.d. Triwulan I-2019 dan 2020 (miliar rupiah)

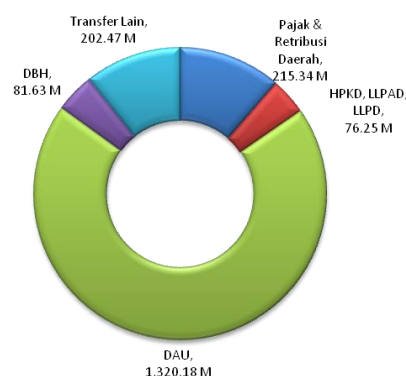
Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	1,538.57	329.29	1,629.96	244.62	1,766.47	291.55
Pendapatan Transfer	7,155.98	1,733.84	7,675.08	1,572.50	6,656.60	1,604.29
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	136.46	20.09	297.67	0.02	321.11	0.03
Jumlah Pendapatan	8,831.00	2,083.23	9,602.72	1,817.15	8,744.17	1,895.88
Belanja	8,388.75	840.08	9,380.75	861.38	8,534.15	1,002.87
Transfer Pemerintah Daerah	1,248.84	155.84	1,258.68	224.78	1,112.74	155.08
Jumlah Belanja dan Transfer	9,637.59	995.92	10,639.43	1,086.16	9,646.88	1,157.95
Surplus/Defisit	(806.59)	1,087.31	(1,036.72)	730.98	(902.71)	737.92

Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan SIKD (diolah)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Jenis pendapatan transfer masih menjadi komponen utama pendapatan daerah dengan porsi 84,62 persen, atau menurun dibandingkan 2019 yang memberikan porsi 86.54 persen dari total pendapatan daerah.

Grafik 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah



Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan SIKD (diolah)

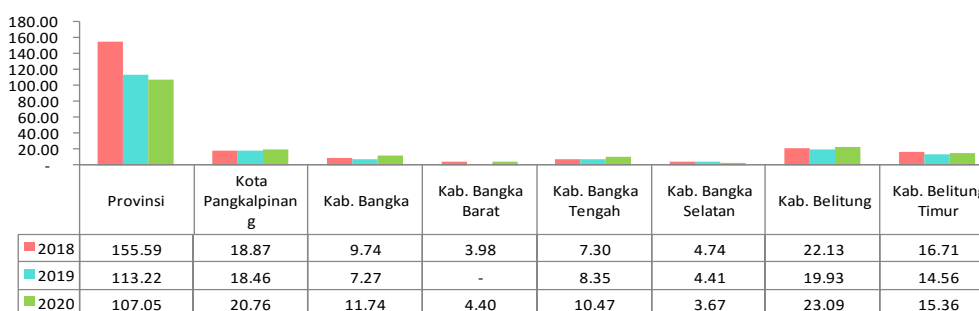
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada triwulan I-2020 mencapai 291,55 miliar, naik 19,19 persen dibandingkan 2019. Kenaikan ini didorong oleh kenaikan Lain-lain PAD yang Sah hingga 26,80 miliar. PAD Babel masih didominasi oleh pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi sebesar 67,41 persen atau turun dibandingkan 2019 yang memberikan kontribusi 76,12 persen dari total PAD.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah mencapai 15,48 persen dari target, atau naik 5,55 persen dari triwulan I-2019. Kenaikan bersumber dari pendapatan pajak penerangan jalan dikarenakan adanya pemasangan pelanggan baru dan perubahan daya listrik dari pihak PLN. Sedangkan pajak daerah yang mengalami penurunan signifikan adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Berdasarkan porsi penerimaan pajak daerah, penerimaan didominasi oleh pajak Bahan Bakar Kendaraan 23,34 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 17,70 persen serta Pajak Penerangan Jalan 16,0 persen. Pemda dengan kenaikan kinerja penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Kabupaten Bangka sebesar 61,48 persen lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2019.

Grafik 3.2 Penerimaan Pajak Daerah (dalam Miliar Rupiah)

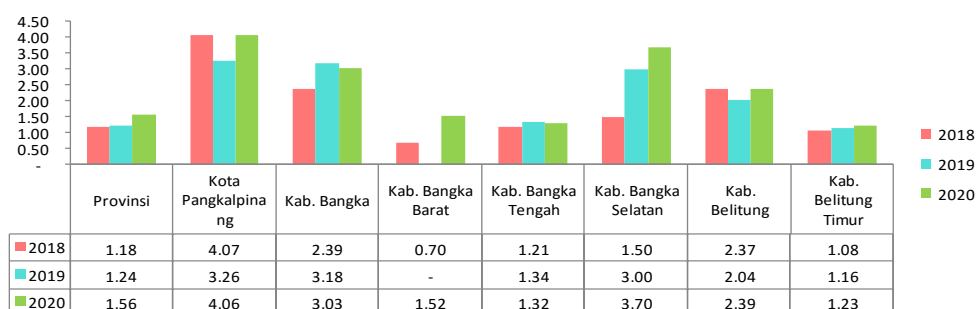


Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan LRA Pemda (diolah)

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar kedua bagi PAD. Target penerimaan retribusi daerah naik 20,43 persen dibandingkan tahun 2019. Begitu pula penerimaan retribusi daerah Babel pada triwulan I-2020 sebesar 18,81 miliar atau naik sebesar 23,60 persen dari triwulan I-2019. Pendapatan retribusi daerah paling besar bersumber dari Pemkot Pangkalpinang. Berdasarkan komposisi pendapatan, retribusi dari Pemkot Pangkalpinang memberikan kontribusi paling besar yaitu 21,60 persen dari total pendapatan retribusi daerah.

Grafik 3.3 Penerimaan Retribusi Daerah (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan LRA Pemda (diolah)

Retribusi Pemprov Babel mengalami peningkatan paling signifikan, sedangkan retribusi Pemda Kabupaten Bangka mengalami penurunan signifikan dibandingkan triwulan I- 2019. Pemprov Babel mengalami kenaikan kinerja penerimaan retribusi terbesar dibandingkan Pemda lainnya, bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan.

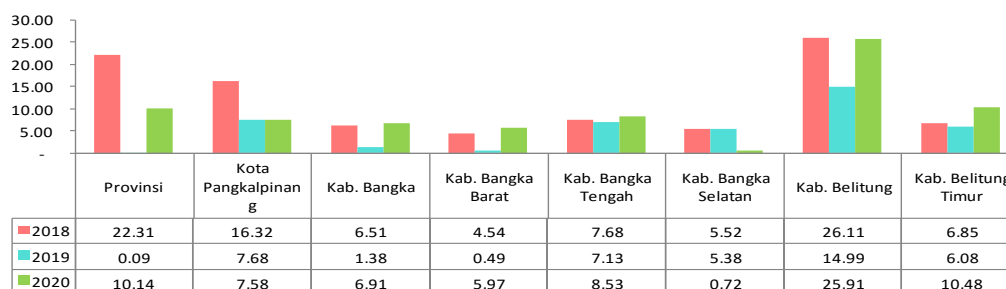
c) Penerimaan Daerah Lainnya

Total realisasi penerimaan daerah lainnya sampai dengan triwulan I-2020 sebesar 76,25 miliar (10,38 persen dari target) atau naik 76,39 persen dibandingkan triwulan I-2019. Komponen utama penerimaan daerah lainnya adalah Lain-lain PAD yang sah yang menyumbang 66,78 persen.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 25,30 miliar (70,98 persen dari target) atau naik 32,59 persen dibandingkan triwulan I-2019. Salah satunya dikarenakan meningkatnya Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencapai 50,92 miliar (13,48 persen dari target) atau naik 111,08 persen dibandingkan triwulan I-2019. Salah satunya dikarenakan meningkatnya pendapatan BLUD.

Grafik 3.4 Penerimaan Daerah Lainnya (dalam Miliar Rupiah)

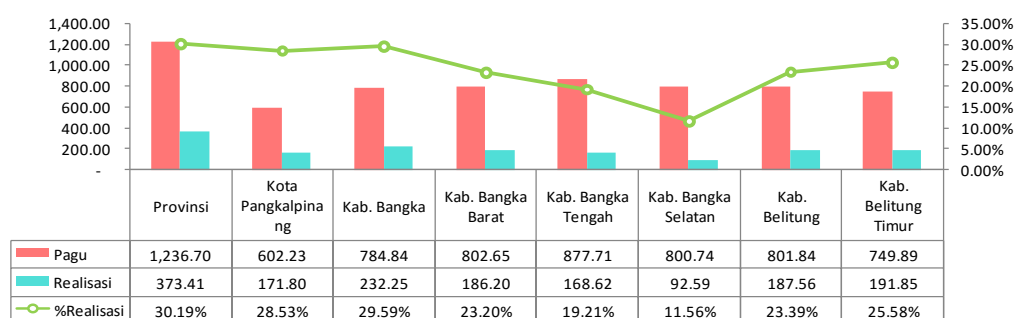


Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan SIKD (diolah)

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar pada realisasi penerimaan daerah triwulan I-2020, yaitu 84,62 persen, turun 1,92 persen dibandingkan triwulan I-2019 yang tercatat pada angka 86,54 persen.

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Laporan GFS TW I-2020 dan SIKD (diolah)

Pada triwulan I-2020, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1,604 miliar, naik dibanding triwulan I-2019 hal ini dikarenakan adanya percepatan penyerapan Dana BOS. Pada tahun 2020 terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS sebagaimana diatur melalui PMK 9/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dimana tahun 2020 penyaluran dilakukan oleh KPPN tipe A1 Provinsi langsung ke rekening sekolah.

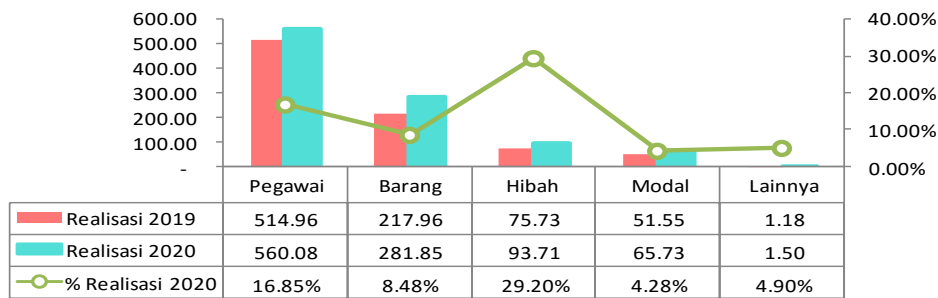
B. Belanja Daerah

1. Belanja Daerah menurut Klasifikasi Jenis Belanja (Sifat Ekonomi)

Pada triwulan I-2020, realisasi belanja daerah konsolidasian sebesar Rp 1.157,95 miliar atau naik 6,61 persen dibandingkan triwulan I-2019. Tingkat penyerapan belanja APBD di Babel sebesar 12 persen dan target penyerapan triwulan I sebesar 15 persen.

Belanja pegawai masih merupakan komponen terbesar belanja daerah dengan porsi 48,37 persen, naik 8,76 persen dibandingkan tahun 2019.

Grafik 3.6 Belanja daerah berdasarkan jenis belanja triwulan I-2019 dan 2020



Sumber: Laporan GFS TW I-2019, 2020 dan SIKD (diolah)

Rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya lebih dikarenakan banyaknya kegiatan yang dana nya baru tersedia pada Triwulan II dan selanjutnya sehingga belum bisa terealisasi pada Triwulan I. Selain itu, adanya pekerjaan yang masih dalam proses pengadaan barang jasa. Pemprov Babel memiliki realisasi belanja daerah tertinggi, dengan porsi 28,01 persen dari total belanja konsolidasian. Pemprov Babel juga memiliki realisasi belanja modal tertinggi dengan porsi 67,52 persen dari total belanja modal konsolidasian.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Berdasarkan fungsi, layanan umum yang terdiri dari urusan administrasi pemerintahan dan urusan keuangan masih menjadi komponen terbesar dalam belanja daerah konsolidasian. Belanja urusan pendidikan memiliki porsi terbesar dengan realisasi mencapai 242,17 miliar. Sedangkan belanja urusan kesehatan, administrasi pemerintahan dan pekerjaan umum dan penataan ruang. Masing-masing memiliki porsi 20,14 persen, 13,24 persen, 11,42 persen, dan 6,59 persen.

Upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 yang dilakukan pemerintah, telah mendorong peningkatan signifikan belanja urusan kesehatan yang naik sebesar 44,06 persen dibandingkan triwulan I-2019. Pemprov Babel memiliki realisasi belanja urusan kesehatan yang tertinggi sampai dengan triwulan I-2020. Sementara komposisi belanja urusan lainnya tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan triwulan I-2019.

Grafik 3.7 Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan



Sumber: GFS TW I-2019 dan 2020 (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir 2020

Prognosis realisasi APBD tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan regresi realisasi APBD triwulan I terhadap realisasi triwulan IV di periode tahun-tahun

sebelumnya untuk komponen Pendapatan Transfer, LLPD, Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Untuk PAD, Belanja Modal dan Belanja Lainnya menggunakan data sisa pagu. Hasil regresi realisasi APBD pada Lampiran II digunakan untuk menentukan prognosis realisasi APBN 2020 untuk komponen Pendapatan Transfer, LLPD, Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Regresi dilakukan dengan menggunakan realisasi triwulan I terhadap realisasi triwulan IV tahun-tahun sebelumnya.

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I 2020		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan	8,744.17	1,895.88	21.68%	7,965.67	91.10%
PAD	1,766.47	291.55	16.50%	1,474.91	83.50%
Transfer	6,656.60	1,604.29	24.10%	6,354.86	95.47%
LLPD	321.11	0.03	0.01%	135.90	42.32%
Belanja	8,534.15	1,002.87	11.75%	7,527.73	88.21%
Belanja Pegawai	3,323.63	560.08	16.85%	2,653.20	79.83%
Belanja Barang	3,321.87	281.85	8.48%	3,051.89	91.87%
Belanja Modal	1,537.07	65.73	4.28%	1,471.33	95.72%
Belanja Lainnya	351.58	95.22	27.08%	351.31	99.92%

Pagu pendapatan transfer di Babel turun di 2020 sebesar Rp1.018,49 miliar atau 13,27 persen dari pagu 2019. Pagu pendapatan asli daerah dari tahun 2020 naik sebesar Rp136,50 miliar atau sebesar 8,37 persen dari 2019. Prognosis untuk komponen lainnya digunakan kinerja penyerapan tahun-tahun sebelumnya yang mendekati 100 persen. Pendapatan pemda diperkirakan terealisasi 91,10 persen dan belanja negara diperkirakan terealisasi 88,21 persen hingga akhir tahun 2020.

Gubernur Erzaldi Berharap Perbankan Optimalkan KUR Pasca Bencana Covid-19

PANGKALPINANG - Menindaklanjuti arahan Presiden RI agar daerah dapat menyerap KUR secara optimal. KUR Babel yang sebelumnya berada di posisi terendah nomor lima se-Indonesia untuk menjadi perhatian khusus. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Babel sebelum pandemi Covid-19 adalah 3,28. Tanpa menggerakkan sektor riil, menurut Gubernur Erzaldi Rosman akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, terlebih setelah Covid-19 ini. Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi daerah ini banyak dipengaruhi oleh ekspor yang 80 persennya dari sektor pertambangan. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong perbankan memberikan layanan di bidang lain seperti UMKM dan pertanian. Oleh sebab itu, dalam Rapat Virtual Gubernur berharap kepada pihak perbankan untuk menyamakan persepsi khususnya dalam kemudahan memberikan layanan KUR kepada masyarakat.

<https://www.babelprov.go.id>, 27 Maret 2020

IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian pada triwulan I-2020 senilai 1.024,46 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,57 persen dibandingkan triwulan I-2019, yang bersumber dari penurunan pendapatan perpajakan. Sedangkan belanja konsolidasian senilai 1.698,86 miliar atau naik 0,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut bersumber dari belanja pemerintah. Meskipun demikian, surplus defisit konsolidasian triwulan I-2019 naik 4,65 persen dibandingkan triwulan I-2019.

Tabel 4.1. Pagu dan Realisasi Konsolidasian s.d. Triwulan I-2020 (Miliar Rupiah)

Uraian	2020			Kenaikan	2019
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	734.47	289.99	1,024.46	-1.57%	1,040.83
Pendapatan Perpajakan	692.55	196.53	889.08	-5.50%	940.78
Pendapatan Bukan Pajak	41.92	93.45	135.37	35.34%	100.03
Hibah	-	0.00	0.00	-97.80%	0.02
Transfer	-	-*	-	-	-
Belanja Negara	573.86	1,125.00	1,698.86	0.81%	1,685.25
Belanja Pemerintah	373.99	1,002.87	1,376.87	12.41%	1,224.88
Transfer	199.87*	122.12	322.00	-30.06%	460.37
Surplus/(Defisit)	160.61	(835.01)	(674.40)	4.65%	(644.42)
Pembiayaan	-	442.98	442.98	41.06%	314.03
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	442.98	442.98	40.62%	315.03
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-100.00%	1.00
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anj	160.61	(392.03)	(231.42)	-29.96%	(330.39)

*) Pengeluaran Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemda
Sumber: RPA & GFS triwulan I-2020 (diolah)

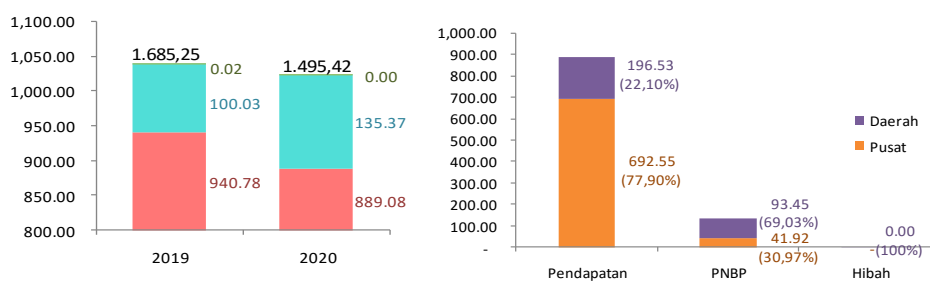
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian triwulan I-2020 turun 1,57 persen dibandingkan triwulan I-2019, bersumber dari penurunan pendapatan perpajakan sebesar Rp51,70 miliar. Pendapatan pusat menyumbang 71,69 persen konsolidasian.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada triwulan I-2020 pendapatan konsolidasian didominasi pendapatan perpajakan dengan komposisi 86,79 persen dari total pendapatan konsolidasian. Sedangkan jika dilihat dari kewenangannya, pendapatan perpajakan pemerintah pusat menyumbang porsi 67,60 persen dan pendapatan perpajakan pemerintah daerah sebesar 19,18 persen. PNBP konsolidasian hanya memiliki porsi 13,21 persen dari total pendapatan konsolidasian, dimana PNBP pusat dan PNBP daerah masing-masing memberikan kontribusi 30,97 persen dan 69,03 persen dari total PNBP konsolidasian.

Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian

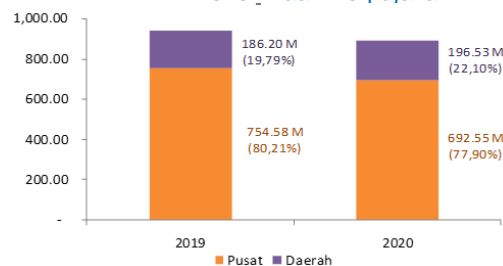


Sumber: GFS Triwulan I-2020 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Penerimaan perpajakan konsolidasian triwulan I-2020 sebesar 889,08 miliar, turun 5,50 persen dibandingkan triwulan I-2019. Penerimaan pajak pusat turun 8,22 persen sedangkan penerimaan pajak daerah meningkat 5,55 persen dibandingkan triwulan

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Perpajakan



Sumber: Kemenkeu dan Pemda (diolah)

I-2019. Penurunan penerimaan pajak pusat tersebut bersumber dari penerimaan pajak PPN yang mengalami penurunan 10,47 persen dibandingkan triwulan I-2019. Sedangkan kenaikan pajak daerah tersebut bersumber dari penerimaan pajak penerangan jalan yang mengalami kenaikan 41,69 persen dibandingkan triwulan I-2019.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Pada triwulan I-2020, PDRB Babel sebesar 18,63 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 1,35 persen. Sedangkan pendapatan konsolidasian sebesar 1.024,46 miliar atau turun sebesar 1,57 persen dibandingkan triwulan I-2019. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Babel memberikan dampak bagi pendapatan pemerintah konsolidasian. Hal ini terlihat dari turunnya pertumbuhan ekonomi Babel triwulan I-2020 begitu pula dengan pendapatan pemerintah konsolidasian yang mengalami penurunan di triwulan I-2020.

Meskipun demikian, tingginya inflasi telah mendistorsi angka pertumbuhan ekonomi. Inflasi telah berdampak bagi turunnya penerimaan daerah khususnya dari sektor pariwisata. Pemda harus lebih serius dalam menciptakan sumber-sumber penerimaan baru berbasis teknologi dan yang tidak rentan terhadap inflasi.

Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2019 dan 2020

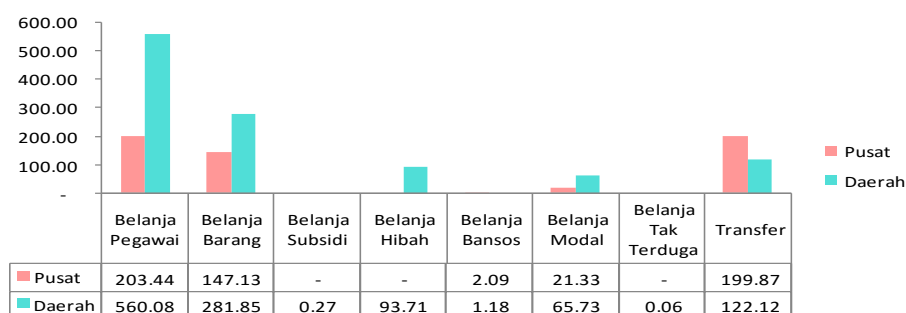
Uraian	2019	2020	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	940.78	889.08	-5.50%
PNBP	100.03	135.37	35.34%
Total	1,040.81	1,024.46	-1.57%
PDRB/Pert.Ekonomi	2.81	1.35	

Sumber: Kemenkeu dan Pemda (diolah)

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber: Kemenkeu dan Pemda (diolah)

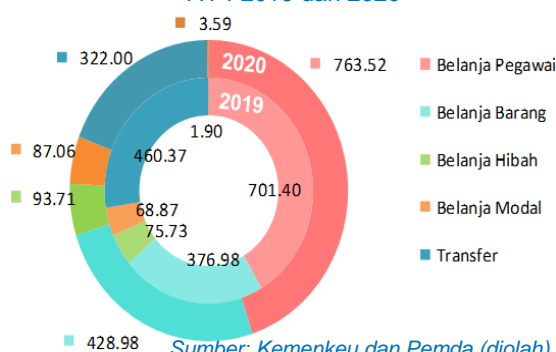
Pada triwulan I-2020 belanja konsolidasian didominasi belanja pegawai dengan komposisi 44,94 persen dari total belanja konsolidasian. Sedangkan jika dilihat dari kewenangannya, belanja pegawai pemerintah pusat menyumbang porsi 11,98 persen dan pemerintah daerah sebesar 32,97 persen. Belanja barang konsolidasian hanya memiliki porsi 25,25 persen dari total belanja, dimana barang barang pusat dan daerah

masing-masing memberikan kontribusi 8,66 persen dan 16,59 persen dari total belanja konsolidasian. Sedangkan belanja modal konsolidasian hanya memiliki porsi 5,12 persen dari total belanja, dimana belanja modal pusat dan daerah masing-masing memberikan kontribusi 1,26 persen dan 3,87 persen dari total belanja konsolidasian.

2. Analisis Perubahan

Belanja pegawai merupakan komponen terbesar, porsinya naik dibandingkan triwulan I-2019, begitu juga pada porsi belanja modal. Belanja konsolidasian triwulan I-2020 sebesar 1.698,86 miliar, naik 0,81 persen dibandingkan triwulan I-2019. Belanja pegawai pusat meningkat 9,12 persen

Grafik 4.4. Komposisi Belanja Konsolidasian TW I-2019 dan 2020



Sumber: Kemenkeu dan Pemda (diolah)

sedangkan belanja pegawai daerah meningkat 8,76 persen dibandingkan triwulan I-2019. Kenaikan belanja pegawai tersebut bersumber dari Belanja Tambahan Penghasilan PNS yang mengalami kenaikan 26,48 persen dibandingkan triwulan I-2019. Belanja modal meningkat 26,40 persen dibandingkan triwulan I-2019, bersumber dari Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp42,12 miliar.

Ke depan, pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi belanja bagi investasi produktif yang diarahkan bagi pembentukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, pengendalian inflasi, dan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, antara lain di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, dan perkebunan.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Lingkup Babel triwulan I-2020. Kontribusi Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB. Dari tabel laporan operasional dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp1.656,31 miliar.

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
Pendapatan:	3.215,77
a. Pajak	889,08
b. Kontribusi sosial	-
c. Hibah	42,91
d. Pendapatan lain	2.283,78
Beban:	1.656,31
a. Kompensasi pegawai	763,52
b. Penggunaan barang dan jasa	419,24
c. Konsumsi aset tetap	-
d. Bunga	-
e. Subsidi	0,27
f. Hibah	423,91
g. Manfaat Sosial	3,27
h. Beban Lainnya	46,11
Keseimbangan operasi bruto/neto	1.559,46
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	87,06
a. Aset Tetap	86,99
b. Persediaan	-
c. Barang berharga	-
d. Aset non produksi	0,07
Net Lending/Borrowing	1.472,40

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp87,06 miliar
3. PDRB Triwulan I-2020 sebesar Rp18,63 triliun.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB sebesar 8,89 persen. Sedangkan nilai investasi pemerintah yang dicerminkan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB sebesar 0,47 persen. Peranan konsumsi pemerintah relatif memiliki efek jangka waktu yang lebih pendek dalam perekonomian dibandingkan dengan investasi terutama pengadaan aset tetap.

Pada triwulan I-2020, kondisi perekonomian tumbuh sebesar 1,35 persen dibandingkan triwulan I-2019 yang sebesar 2,81 persen. Maka dari itu, kontribusi Pemerintah dari investasi sebesar 0,47 persen diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

V. Berita Fiskal Terpilih: Tekanan COVID-19 terhadap Perekonomian Babel

Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei Cina. Dikarenakan tingkat penyebaran, kecepatan penularan, dan keparahan yang mengawatirkan, sejak 12 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi. Sampai dengan 27 April 2020 tercatat lebih dari 3,04 juta kasus telah dilaporkan di 185 negara dan wilayah yang mengakibatkan lebih dari 211.000 kematian. Sedangkan lebih dari 893.000 orang dilaporkan telah pulih.

Negara-negara yang menjadi epicentrum penyebaran wabah telah melakukan langkah strategis isolasi wilayah hingga lockdown guna memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut. Indonesia sendiri sejak mewabahnya COVID-19 belum mengambil langkah penguncian wilayah. Hal ini dikarenakan kebijakan lockdown harus didukung dengan pertimbangan dan mitigasi risiko yang matang baik dari aspek perekonomian yang harus dipersiapkan dan dampak sosial yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut.

Jumlah pasien COVID-19 di Indonesia sampai dengan 27 April 2020 adalah 9,096 orang terkonfirmasi (+214 Kasus), 7,180 orang dalam perawatan (78.94 persen dari terkonfirmasi), 1,151 orang sembuh (12.65 persen dari terkonfirmasi), dan 765 orang meninggal (8.41 persen dari terkonfirmasi). Sedangkan jumlah pasien COVID-19 di Babel sejak kasus pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 27 April 2020 adalah 10 orang terkonfirmasi, 965 orang dalam pemantauan, 73 pasien dalam pengawasan, dan 787 orang tanpa gejala. Dalam hal ini, Pemprov telah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Babel yang dipimpin langsung oleh Gubernur.

A. Dampak Terhadap Perekonomian dan Fiskal Pemerintah

Hampir seluruh negara di dunia terkena dampak dari menyebarnya pandemi COVID-19. Bukan hanya dari belanja pemerintah yang harus dikeluarkan di bidang kesehatan, namun juga roda perekonomian yang melambat seiring dengan kebijakan pembatasan sosial maupun lockdown yang diambil oleh negara-negara tersebut. Lalu sejauh mana pandemi COVID-19 memberikan tekanan bagi perekonomian dan fiskal pemerintah khususnya di Babel.

1) Pertumbuhan ekonomi melambat

Secara global, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan 29 dari total 210 negara yang terdampak, merupakan kontributor utama PDRB dunia yang memberikan porsi 99,8 persen. Demikian juga bagi Indonesia maupun wilayah Babel yang memiliki struktur ekonomi sangat terkait antar wilayah (domestik) maupun dengan negara lain (global).

Dari sisi produksi, ketergantungan Babel di tingkat domestik di bidang pariwisata dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat masih tinggi. Demikian juga ketergantungan terhadap di tingkat global dalam memasarkan produk unggulan berupa timah, lada, dan karet. Tentunya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh wilayah lain maupun negara lain (terutama yang menjadi mitra dagang) sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi perekonomian Babel.

Sektor Tambang Diserang Virus Corona

PANGKALPINANG - Direktur Utama Timah, Riza Pahlevi mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan pasar untuk mengakselerasi penjualan terutama pasar ekspor. Oleh karena itu, sementara ini Timah menurunkan produksi dan menahan penjualan hingga harga dinilai menguntungkan perusahaan.
<https://www.babelprov.go.id>, 27 Maret 2020

Sektor pertambangan dan pengolahan sebagai salah satu sektor utama pertumbuhan Babel sudah mulai menunjukkan tren penurunan mulai Maret 2020. Tekanan pada sektor pertambangan dan pengolahan Babel tersebut dikarenakan:

- Turunnya harga timah dunia sebagai akibat banyaknya perusahaan elektronik menghentikan produksi sehingga permintaan timah global turun cukup signifikan. Kondisi ini direspon perusahaan pertambangan dan pengolahan timah dengan mengurangi produksi 20-30 persen dari target bulanan guna menekan cost.
- Selain menurunkan jumlah produksinya, perusahaan juga merespon rendahnya harga timah dunia dengan menahan ekspor hingga harga kembali normal. Turunnya ekspor tersebut juga dikarenakan pembatasan (*lockdown*) yang dilakukan oleh beberapa negara tujuan ekspor timah.

Tabel 5.1 Produksi Mineral dan Batuan Babel

a) Non Timah

Jenis Mineral	Penjualan 2020 (M Ton)		
	Januari	Februari	Maret
Pasir kuarsa	644.323	500.634	685.172
Kaolin	24.106	17.934	21.585
Zircon	-	-	2.296
Pasir Bangunan	103.723	73.752	120.145

Tanah liat	50.952	58.254	39.360
Granit	-	-	750
b) Timah			
	Penjualan 2020 (M Ton)		
Perusahaan	Januari	Februari	Maret
PT Timah	6.235,00	6.225,00	3.255,6
PT Mitra Stania Prima	50,29	225,77	250,33
PT Refined Bangka Tin	-	221,21	226,20
PT Menara Cipta Mulia	-	-	150,7

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kep. Babel

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran, turunnya daya beli masyarakat dikarenakan banyaknya karyawan yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja akan menekan konsumsi rumah tangga secara agregat. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi motor utama penggerak ekonomi Babel (pada tahun 2019 tercatat memberikan kontribusi sebesar 63,45 persen terhadap pertumbuhan ekonomi). Besarnya peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Babel membuat perubahan laju pertumbuhannya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Babel secara keseluruhan.

2) Inflasi berpotensi meningkat

Sampai dengan akhir triwulan I-2020, pandemic COVID-19 mulai berdampak bagi inflasi Babel khususnya di sektor Kesehatan dan Teknologi Informasi. Inflasi terkendali karena didukung kecepatan pemerintah dalam memastikan pasokan dan distribusi bahan pangan. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan akan meningkat pada triwulan-triwulan selanjutnya, baik dikarenakan naiknya permintaan maupun dorongan biaya.

Terdampak COVID-19, inflasi dapat bersumber dari lonjakan jumlah permintaan dikarenakan terjadinya *panic buying*. *Panic buying* dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Kekhawatiran masyarakat tersebut menimbulkan respons tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri. Dalam hal ini, peran media informasi sangatlah penting untuk mengendalikan dan mengantisipasi terjadinya kepanikan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Selain itu inflasi juga bersumber dari dorongan biaya terjadi karena *social distancing* yang mengakibatkan turunnya seluruh aktivitas ekonomi dan dikarenakan kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku terutama yang didatangkan dari luar daerah.

3) Bertambahnya jumlah penduduk miskin baru

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2019 sampai dengan September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Babel mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,514 pada Maret 2019 menjadi 0,568 pada September 2019. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,102 menjadi 0,120. Turunnya daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian dan pembatasan sosial akan mengakibatkan

masyarakat ekonomi menengah jatuh ke bawah garis kemiskinan (rentan miskin). Saat ini jumlah penduduk rentan miskin Babel sebanyak 36.910 KK.

4) Bertambahnya jumlah pengangguran

Pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi bukan hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun juga peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar. Sampai dengan 22 April 2020 terdapat 3.342 karyawan di Babel yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja oleh 146 perusahaan yang mayoritas bergerak di lapangan usaha pariwisata. Jumlah terbanyak karyawan yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja adalah di Kabupaten Belitung karena memang wilayah tersebut merupakan sentra wisatanya Babel. Hal ini sesuai dengan perkiraan Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, bahwa lapangan usaha akan mengalami dampak yang berbeda dikarenakan pandemi dan yang paling parah adalah pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan.

Tabel 5.2 Jumlah Karyawan yang Dirumahkan atau di-PHK di Babel Per 22 April 2020

Wilayah	Jumlah perusahaan	Jumlah dirumahkan	Jumlah diPHK
Pangkalpinang	53	949	78
Bangka	20	305	24
Bangka Tengah	14	432	22
Bangka Selatan	3	14	147
Bangka Barat	-	-	-
Belitung	48	1.232	63
Belitung Timur	8	54	22
Jumlah	146	2.986	356

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Babel

5) Risiko fiskal daerah meningkat

Secara nasional, target pendapatan ditetapkan turun 21,1 persen dari Rp 2.233 T menjadi Rp 1.760 T, sebagai dampak dari penurunan kegiatan ekonomi akibat dan pembatasan kegiatan masyarakat. Sedangkan belanja kementerian negara/lembaga justru meningkat 10 persen dari Rp 1.683 T menjadi Rp 1.851 T, termasuk 255 T khusus untuk penanganan COVID-19 di bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan upaya pemulihan ekonomi. Sementara itu, belanja transfer turun sekitar 11,9 persen dari 865 T menjadi 762 T.

Tekanan terhadap APBN tersebut meningkatkan potensi risiko fiskal daerah. Rendahnya penerimaan perpajakan dan turunnya pendapatan transfer dihadapkan pada kebutuhan belanja tidak terduga yang membengkak, sangat berpotensi menjadikan defisit APBD semakin lebar. Guna meminimalisir risiko fiskal daerah dan dalam rangka penanganan COVID-19, berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, pemda melakukan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Setidaknya beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemda di Babel dalam rangka pengelolaan risiko fiskal daerah dalam rangka refocussing tersebut, yaitu:

- 1) Memangkas belanja barang yang tidak secara langsung menyentuh masyarakat;

- 2) Melakukan negosiasi ulang terhadap belanja modal yang sudah dilaksanakan dan belanja modal lainnya yang sudah ditandatangani;
- 3) Menghentikan seluruh belanja modal yang belum dilelang;
- 4) Menunda belanja hibah yang belum dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 5) Menghentikan seluruh kegiatan bersifat pembinaan, sosialisasi, rapat, dan event yang melibatkan orang banyak, selanjutnya dilakukan secara *virtual meeting*;
- 6) Menghentikan seluruh belanja perjalanan dinas.

B. Alokasi APBN

Dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Babel cukup besar. Baik yang dialokasikan melalui Dana Transfer Umum (DTU) maupun Dana Transfer Khusus (DTK) ke daerah sebagaimana diatur pada PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19.

Sedikit berbeda dengan DTU, alokasi DTK oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah telah ditetapkan peruntukannya. Sehingga terkait dengan percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 cenderung lebih mudah ditelusuri besaran alokasinya.

1. DAK Fisik

Sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, total penyaluran DAK Fisik pada subbidang-subbidang kesehatan khususnya Pelayanan Rujukan (R); Pencegahan Penyakit (P); dan Penguatan RS Rujukan (P) yang terkait secara langsung untuk percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Babel sebesar Rp2,72 miliar dari total anggaran sebesar Rp320,33 miliar. Dari total penyaluran tersebut, sebesar Rp740 juta dilakukan oleh Pemkot Pangkalpinang, sedangkan Rp1,98 miliar sisanya dilakukan oleh Pemkab Bangka Selatan.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 di Babel

Pemda	DAK Fisik		Dana Desa	
	Pagu	Penyaluran	Pagu	Penyaluran
Provinsi Kep. Babel	66,45		-	
Kota Pangkalpinang	30,40	0,74	-	
Kabupaten Bangka	83,91		21,52	
Kabupaten Bangka Barat	28,93		20,45	
Kabupaten Bangka Tengah	2,17		19,11	
Kabupaten Bangka Selatan	34,82	1,98	18,06	
Kabupaten Belitung	32,16		16,65	0,85
Kabupaten Belitung Timur	41,48		15,64	
Total	320,33	2,72	111,44	0,85

Sumber: OMSPAN

2. Dana Desa

Dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dan social dikarenakan terjadinya pandemic, pemerintah telah menyalurkan bantuan social, yang salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa 2020. Alokasi

jumlah Dana Desa untuk BLT disesuaikan dengan total Dana Desa 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah Rp800 juta maka alokasi BLT sebesar 25 persen. Jika desa memperoleh Rp800 juta-Rp1,2 miliar alokasi BLT sebesar 30 persen, dan jika desa memperoleh di atas Rp1,2 miliar alokasi BLT mencapai 35 persen.

Total alokasi BLT Dana Desa 2020 untuk wilayah Babel senilai Rp111,44 miliar atau 35 persen dari total pagu Dana Desa 2020. Total penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang bersumber dari pemanfaatan Dana Desa (berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa) sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 telah mencapai Rp853,2 juta dari total anggaran sebesar Rp111,44 miliar. Baru Pemkab Belitung yang telah menyalurkan BLT Dana Desa tersebut bagi 12 desa dengan total 1.422 penerima.

C. Alokasi APBD

Secara umum terdapat tiga langkah penanganan yang dilakukan oleh Pemda dalam Percepatan Penanganan dan Pencegahan COVID-19, yaitu:

a. Penanganan pasien dan pencegahan penyebaran

Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27 miliar di bidang kesehatan untuk penanganan pandemic dengan rincian Rp2 miliar dialokasikan untuk penambahan ruang isolasi dan insentif tenaga medis, sedangkan Rp25 miliar untuk membiayai peningkatan pengamatan, imunisasi, dan kesehatan situasi khusus, serta usulan pembiayaan anggaran operasional sekretariat gugus tugas pencegahan COVID-19.

Saat ini Pemprov telah mempersiapkan enam rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 telah disiapkan pemprov Babel, yakni RSUD Depati Hamzah kota Pangkalpinang, RSUD Marsidi Judono kabupaten Belitung, RSUD Soekarno Babel, RSUD Sejiran Setason Bangka barat, RSUD Eko Maulana Ali Kabupaten Bangka, dan RSUD kabupaten Bangka Selatan.

b. Jaring pengaman sosial

Pemda telah menyiapkan anggaran Rp196,5 miliar untuk membantu 80.574 kepala keluarga (KK) terdampak COVID-19 (berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinsos kabupaten/kota dari tahun 2016 hingga sekarang). Dari total anggaran tersebut, Pemprov menanggung 30 persen atau sekitar Rp58,9 miliar sedangkan sisanya, 70 persen atau Rp137,5 miliar dibagi ke 6 kabupaten/kota. Pemkab Bangka mengalokasikan Rp30,6 miliar, Pemkab Belitung Rp17 miliar, Pemkab Bangka tengah Rp20,8 miliar, Pemkab Bangka Barat Rp20,9 miliar, Pemkab Bangka Selatan Rp13,9 miliar, Pemkab Belitung Timur Rp16,1 miliar, dan Pemkot Pangkalpinang sebesar Rp17,9 miliar. Sedangkan dari jumlah penerima bantuan jaring pengaman social tersebut, sebanyak 20,436 KK merupakan penerima bantuan PKH dan BPNT, 23.131 KK penerima bantuan PKH saja, dan 36.910 KK merupakan penduduk yang rentan miskin yang tidak mendapatkan bantuan.